

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA TAHELE KECAMATAN
POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO**

Oleh :

**RAWI ADAM
NIM : E21 19 238**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA TAHELE KECAMATAN
POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO**

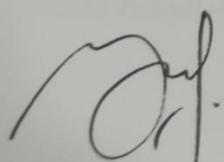
Oleh

**RAWI ADAM
E21.19.238**

SKRIPSI

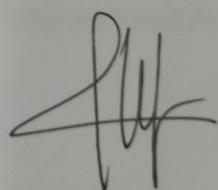
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 08 November 2021

PEMBIMBING I



**TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403**

PEMBIMBING II



**NG SYAMSIAH, B, SE., MM
NIDN : 0921018003**

HALAMAN PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TAHELE KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHUWATO

Oleh

**RAWI ADAM
E21.19.238**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

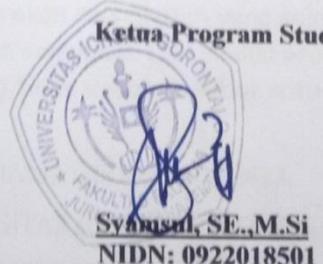
1. Sulaiman, SE., MM
2. Sri Dayani Ismail, SE., MM
3. Sulerski Monoarfa, S.Pd., M.Si
4. Tamsir, SE., MM
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Manajemen



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“..Jadilah pemenang dalam perlomba menuju kebaikan

Dan ketaatan kepada allahswt, dan janganlah berlomba-lomba dalam urusan dunia, Sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya.”

(Q.S Al-Baqarah 146)

“..Hiduplah seperti kopi, walaupun pahit tapi dinikmati..”

(Rawi Adam)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya sesederhana ini saya persembahkan untuk:

Ibudan Ayah tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan Tiada henti memberikan do'a dan motivasi serta selalu memberikan dukungan dalam bentuk materi.

Suami dan Anak tersayang yang selalu menyemangati, memberi Dukungan serta memotivasi agar dapat menyelesaikan kripsi tepat waktu, dan tiada henti memberikan doa.

Almamater tercinta dan dosen-dosen yang telah membimbing Dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

Sahabat dan rekan-rekan seangkatan yang selalu membantu Dan mensuport dalam segalahal. Dan semua orang yang telah mendo'akan yang tidak dapat di sebut satu-persatu.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPATKU MENIMBAH ILMU

2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 November 2021

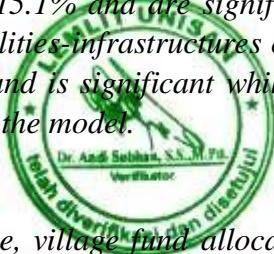


Rawi Adam
E21.19.238

ABSTRACT

RAWI ADAM. E2119238. THE FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS AT TAHELE VILLAGE, POPAYATO TIMUR SUBDISTRICT, POHUVATO DISTRICT

The purpose of this study is to find and analyze the competence, regulation, and facilities-infrastructures factors affecting the management of Village Fund Allocation at Tahele Village. This study uses a quantitative method. In accord with the results of data processing and discussion, it is found that the competence factor of the apparatus partially has a positive effect of 0.131 but is not significant. The village-level regulation factor partially has a positive effect of 0.780 and is significant. The facilities and infrastructure factors partially have a positive effect of 115.1% and are significant. Holistically, the competence, village-level regulations, facilities-infrastructures of the apparatus simultaneously have a positive effect of 0.595 and is significant while the remaining 40.5% is explained by other variables outside of the model.



Keywords: competence, regulation, facilities, infrastructure, village fund allocation

ABSTRAK

RAWI ADAM. E2119238. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TAHELE KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHUVATO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor kompetensi, regulasi, sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil olahan data dan pembahasan, ditemukan bahwa faktor kompetensi aparat secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,131 namun tidak signifikan. Faktor regulasi tingkat desa secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,780 dan signifikan. Faktor sarana dan prasarana secara parsial berpengaruh positif sebesar 115,1% dan signifikan. Secara keseluruhan, faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana secara simultan berpengaruh positif sebesar 0,595 dan signifikan sedangkan sisanya sebesar 40,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.



Kata kunci: kompetensi, regulasi, sarana, prasarana, alokasi dana desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato**". sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Symasiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Ramli Pakeu, Selaku Kepala Desa pada Desa Tahele, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Aarin, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 November 2021

(**Penulis**)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.. Alokasi Dana Desa	7

2.1.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa	9
2.1.2. Struktur Pengelolaan Alokasi Dana Desa	10
2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	17
2.2.1. Kompetensi Aparat Desa	17
2.2.2. Regulasi Tingkat Desa (Aturan di Desa)	19
2.2.3. Sarana Dan Prasarana	21
2.3. Kerangka Pikir	24
2.4. Hipotesis	25
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	26
3.1. Objek Penelitian.....	26
3.2. Metode Penelitian	26
3.2.1. Desain Penelitian	26
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	27
3.2.3. Populasi dan Sampel	28
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	29
3.2.5. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif	36
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi (X1)	37
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Regulasi (X2)	40
4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Sarana Prasarana (X3)	42
4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan ADD (Y) ..	44

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian	27
Tabel 3.2. Tabel Skala Likert	30
Tabel 4.1. Sejarah Pemerintah Desa	35
Tabel 4.2. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	36
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Indikator Pendidikan	37
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Indikator Pelatihan & Pengalaman	38
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Indikator Kompetensi	39
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Indikator Regulasi	40
Tabel 4.7. Rekapan Tanggapan Responden Variabel Regulasi	41
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Indikator Sarana Prasarana	42
Tabel 4.9. Rekapan Tanggapan Responden Indikator Sarana Prasarana	44
Tabel 4.10. Tanggapan Responden Indikator Alokasi Dana Desa	44
Tabel 4.11. Tanggapan Responden Indikator Alokasi Dana Desa	46
Tabel 4.12. Tanggapan Responden Indikator Alokasi Dana Desa	47
Tabel 4.13. Rekapan Tanggapan Responden Indikator Alokasi Dana Desa	49
Tabel 4.14. Tabel <i>Coefficients</i>	50
Tabel 4.15. Tabel <i>Model Summary</i>	51
Tabel 4.16. Tabel Uji t	52
Tabel 4.17. Tabel Uji F	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ilustrasi SOTK Pemerintah Desa & PTPKD	11
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	58
Lampiran 2 Kuisioner	59
Lampiran 3 Tabulasi Data	64
Lampiran 4 Frequency Variabel Y	67
Lampiran 5 Frequency Variabel X ₁	71
Lampiran 6 Frequency Variabel X ₂	74
Lampiran 7 Frequency Variabel X ₃	76
Lampiran 8 Output Regression	78
Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian	80
Lampiran 10 Surat Balasan Penelitian	81
Lampiran 11 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	82
Lampiran 12 Hasil Turnitin	83
Lampiran 13 Curriculum Vitae	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan penganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, namun dalam pelaksanaannya seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah.

Bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pemerintah desa adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota untuk pembangunan wilayah pedesaan yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang

berasal dari pemerintah kabupaten/ kota yang diberikan kepada pemerintah desa yang diharapkan bisa menopang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Desa tahap perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Pelaksanaan alokasi danadesa dapat dikatakan akuntabel dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki

kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaanya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundung-undangan. Ini artinya, dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus profesional dalam mengelola keuangan desa.

Observasi awal yang dilakukan dilolaksi penelitian yaitu di Kantor Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dapat diperoleh keterangan, bahwa terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah kompetensi aparat desa yang masih rendah, regulasi tingkat desa (peraturan di desa) terkait pemerintahan desa masih belum sempurna, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor kompetensi aparat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Apakah faktor regulasi tingkat desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
3. Apakah faktor sarana dan prasarana berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
4. Apakah faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian iniY adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh faktor kompetensi aparat secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Pengaruh faktor regulasi tingkat desa secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

3. Pengaruh faktor sarana dan prasarana secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
4. Pengaruh faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana secara simultan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi :

a. Bagi Kantor Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alokasi Dana Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanjadesa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Hanif (2011:88-89) menyatakan hakikat ADD, adalah: “ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya”.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 62 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan terdapat 2 (dua) jenis penggunaan ADD yaitu:

1. Alokasi dasar, diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten. Alokasi dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaran penyelenggaraan kewenangan desa terdiri atas penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.
2. Alokasi proporsional, diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah aparatur pemerintahan desa masing-masing dalam kabupaten. Alokasi proporsional dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Belanja pegawai terdiri dari untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan penghasilan BPD. Sedangkan belanja operasional digunakan untuk operasional penyelenggaran pemerintahan desa terdiri dari operasional pemerintah desa dan operasional BPD.

2.1.1. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak (2013;71) pembangunan desa merupakan tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa menurut Mardiasmo (2002;105) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan yang diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Perdes tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

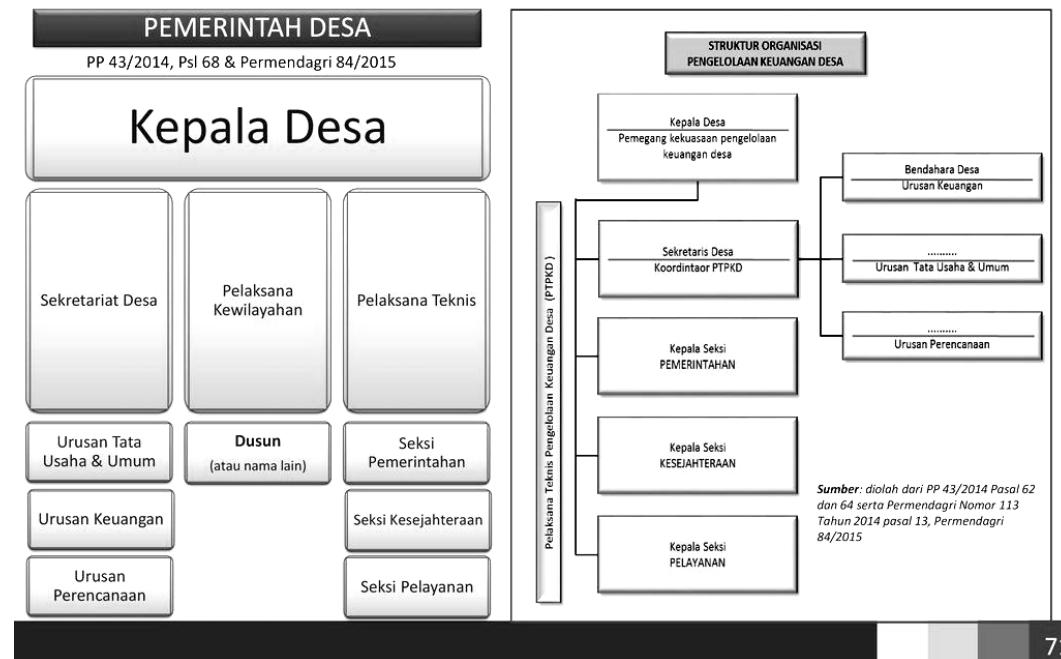
- c. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
- d. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. Masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/ Bupati setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu, pemerintah desa juga harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.1.2. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan disandingkan dengan SOTK pada pemerintah desa (Adrian Puspawijaya, 2016: 14-19) dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pemdes & PTPKD



Gambar 2.1 Ilustrasi SOTK Pemerintah Desa dan PTPKD

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa sebagian diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Uraian lebih lanjut kewenangan Kepala Desa dan PTPKD diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakil ipemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa ;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 jo Nomor 47 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa ;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan ;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsure dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar ;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya ;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati /walikota. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/ atau Badan

Permusyawaratan Desa emfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan bupati /walikota.

b. Kelembagaan Masyarakat Desa

Didalam UUDesa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), RukunWarga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotongroyong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan

programnya didesa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada didesa.

2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.2.1. Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi aparat desa adalah kemampuan aparat desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sementara kinerja aparat desa adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (*kelembagaan*) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Aparat desa yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan aparat desa dalam memahami dan menerapkan logika manajemen keuangan akan berdampak pada kekeliruan kebijakan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Marihot (2002;2) menjelaskan bahwa sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi karena merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan. Sedangkan Mardiasmo (2009;174) menjelaskan bahwa pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi

yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (*disclosure*) dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten.

Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana pemerintah, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuan, kualitas keputusan menjadi buruk, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/ Bupati setiap akhir tahun anggaran berupa laporan keuangan yang merupakan media bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Jika pemerintah desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota/ Bupati maka akan berdampak pada penyaluran dana desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang

didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Aparat desa yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.2.2. Regulasi Tingkat Desa (Peraturan di Desa)

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan ditingkat desa dalam bentuk peraturan desa. Amanat dari regulasi untuk menyusun Peraturan Desa (Adrian Puspawijaya, 2016: 18) adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 173;
- b. RPJMDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 179;
- c. RKPDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29;
- d. Pendirian BUMDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132;
- e. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;

- f. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110;
- g. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125;
- h. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150;
- i. Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152;
- j. Pembentukan Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19; dan
- k. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, desa atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan

perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana desa merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan desa.

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegah banjir setempat. Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryo,1996 dalam Juliawan, 2015:6).

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan.

Adapun Komponen Prasarana adalah :

1. Jalan, adalah jaringan jalan memiliki fungsi utama yaitu menghubungkan berbagai pusat jasa distribusi. Namun secara ekonomi jalan dapat didefinsikan sebagai pusat jasa distribusi tersebut merupakan titik tumpu tumbuh dan berkembangnya kawasan pedesaan yang berperan melayani wilayah sekitarnya, saling terkait satu dengan lainnya dalam satu hubungan hirarki tertentu. Fungsi jalan sesuai jangkauan pelayanannya membentuk fungsi arteri, kolektor, lokal, sedangkan secara administrasi yaitu jalan nasional, propinsi dan kabupaten. Sedangkan peran dominan secara ekonomi adalah mendukung pelayanan pusat-pusat produksi/ industri, pertanian, pertambangan, kehutanan dan pariwisata. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Air bersih, adalah air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi dan energi. Air sebagai salah satu faktor essensial bagi kehidupan sangat dibutuhkan dalam kriteria sebagai air bersih. Air bersih adalah air yang layak digunakan untuk keperluan keluarga atau rumah tangga karena telah memenuhi syarat. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.
3. Persampahan, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari

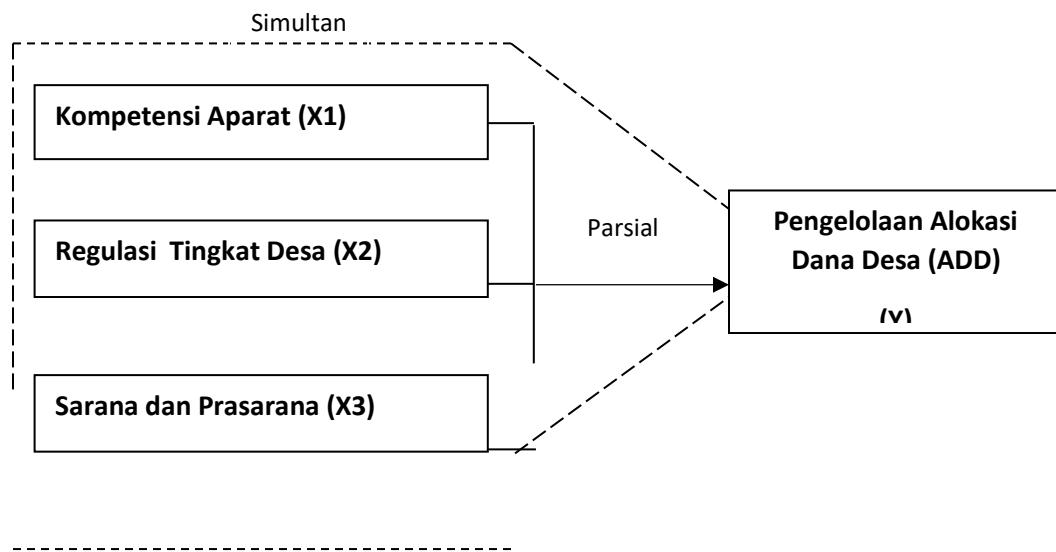
pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan ditempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

4. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
5. Listrik/ energy, adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik. Listrik telah menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, dan arus listrik.
6. Telekomunikasi, adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lainnya.

2.3. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Kerangka Pikir

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab II dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah:

5. Faktor kompetensi aparat berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
6. Faktor regulasi tingkat desa berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
7. Faktor sarana dan prasarana berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
8. Faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana berpengaruh positif secara simultan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah faktor kompetensi, regulasi, sarana dan prasarana yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, dengan waktu pengumpulan data kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Juli hingga Oktober 2021.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tahele Kecamtan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato. Peneliti melakukan penyebaran kuisioner untuk memperoleh informasi tentang masalah

yang berkaitan dengan faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian di lakukan olah data menggunakan pendekatan kuantitatif dan di deskripsikan menggunakan data dari hasil kuisioner yang telah disebar sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis, pihak luar, dan peneliti selanjutnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X), yang kemudian dioperasionalisasikan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi bagi para pembaca. Untuk lebih jelasnya variabel independen dan variabel dependen yang dimaksud adalah :

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	Transparan	1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh 2. Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi 3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan 4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab	Ordinal
	Akuntabel	1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan 2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan 3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut	

		4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan	
	Partisipatif	1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa 3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa 4. Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa	
Kompetensi (X ₁)	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Pendidikan • Memahami siklus Keuangan • Memahami Tupoksinya 	Ordinal
	Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan • Keikutsertaan dalam pelatihan 	
	Pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam bekerja • Bekerja berdasarkan pengalaman 	
Regulasi (X ₂)	Tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib Administrasi • Patuh terhadap aturan 	Ordinal
	Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tepat Waktu • Taat pada pimpinan 	
Sarana Prasarana (X ₃)	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa • Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur 	Ordinal
	Non Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa • Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa • Pembangunan infrastruktur di desa sudah efektif 	

3.2.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 30 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44)

sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. *Library Research*

Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. *Field Research*

Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
2. Kuisisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial

(Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3.2.
Skala Likert

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari bentuk secara simultan (bersama-sama) dan

parsial (sendiri-sendiri) antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Pengelolaan Alokasi Dana Desa)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b1 = Koefisien regresi Kompetensi

b2 = Koefisien regresi Regulasi

b3 = Koefisien regresi Sarana Prasarana

X1 = Variabel independent Kompetensi

X2 = Variabel independent Regulasi

X3 = Variabel independent Sarana Prasarana

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan

standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Apakah jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka H0 dapat ditolak. Membandingkan nilai t table, kita menerima Ha yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2016:98-99).

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2016:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Apabila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Menurut Ghozali (2016:97) nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asal usul Desa Tahele adalah terbentuk dari pemekaran desa Popayato yang terletak sebelah utara desa popayato. Ringkas cerita Pada zaman dahulu sekitar Tahun 1902 ada rumput yang mengeluarkan aroma harum ketika dibakar, dengan berjalananya waktu masyarakat sering menceritakan hal aneh ketika membakar rumput yang jenis tumbuhan rumput yang belum diketahui namanya. Dikarenakan rumput ini menjadi guyongan masyarakat dan tanpa disadari disebut menjadi rumput tahele dan dinamakan sebuah desa ketika pemekaran desa popayato sebelah utara. Hal ini terprakasai atas perjuangan para tokoh masyarakat yakni dari golongan tokoh pemuda seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat maka desa ini terbagi atas berbagai dusun. Sehingga pada tahun 2003 desa Tahele terpisah dari pemekaran desa Bukit Tingki, desa Maleo dan desa Marisa. Desa ini terkenal dengan hutan yang hijau yang ditumbuhi pepohonan dan semak yang masih lebat sehingga pada dahulu kala desa ini tertulis sebagai desa yang subur dan tumbuhan yang menghijau di atas tanahnya terkenal di provinsi Gorontalo. Sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun masih dalam kehidupan yang sederhana akan tetapi masyarakat desa Tahele senantiasa terjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.

Desa Tahele masuk dalam wilayah kecamatan Popayato Timur yang terletak disebelah utara berbatasan dengan desa Marisa sebelah selatan dengan desa Maleo

sebelah timur dengan desa Londoun sehingga pada tahun 2008 desa ini sudah termasuk dalam belahan pemekaran popayato sehingga termasuk di dalam kecamatan Popayato Timur. Jumlah penduduk sampai pada tahun 2009 mencapai 1.455 Jiwa dan jumlah KK 393 sehingga pada tahun 2010 jumlah bertambah menjadi 409 dengan luas wilayah 6 KM2, mata pencaharian sebagian masyarakat desa Tahele adalah petani, dan tukang kebun. Dimana untuk petani di dominasi oleh petani jagung dengan luas lahan tanaman jagung mencapai 427 Ha. Dengan luas pemukimannya 128 Ha. Jumlah kelompok tani berjumlah 14 kelompok. Dengan adanya pertanian tersebut dapat menghidupi kehidupan masyarakat Desa Tahele. Sampai saat ini keharmonisan antarwarga dan system pemerintahan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2005 telah mengadakan pemilihan kepala desa langsung dan yang terpilih adalah Bapak Mohamad Sideni untuk periode 2005-2011., Beliau adalah orang kelima yang menduduki kursi pemerintahan desa tahele, setelah masa pemerintahan Mohammad Sideni terjadi pemilihan kembali karena masa jabatan pemerintah terdahulu sudah selesai masa jabatannya, dan hasil pemilihan yang terpilih sebagai pemerintahan selanjutnya yakni Bapak Usman Sino masa periode 2011-2016.

Mayoritas mata pencaharian penduduk sangat mempengaruhi lajunya perkembangan perekonomian desa ini disebabkan oleh adanya kejasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dengan mengadakan sosialisasi pembibitan, pengukuhan dan pengelolaan dalam bidang pertanian sehingga bias mengasah keahlian para petani, perkebunan di desa tahele. Kemudian terjadi kekosongan kepala desa selama 2017-2018 olehnya pemerintah kecamatan Popayato Timur menunjuk Bp. Ismail Pantuna, S,Sos untuk menjadi Pekasana tugas sebagai kepala desa.

Padabulan November 2018, desa Tahele melaksanakan pemilu dengan bakal calon sebanyak lima orang dan yang terpilih adalah Bp Ramly Pakeu, S.Sos, untuk periode masa jabatan 2019 sampai 2024, sementara itu visi misi beliau tertuang dalam RPJMDes ini di samping usulan-usulan dari tiap-tiap dusun yang telah di musyawarahkan pada Musdus melalui pengkajian keadaan Desa, pada musyawarah ini melipatkan banyak elemen masyarakat seperti, Tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, kaum diffable, petani dan masyarakat lain yang di hadikan pada musyawarah dusun. Di sini termuat pada lampiran dana kan di jabarkan pada bab berikutnya. RPJMDes ini wajib di buat oleh setiap Kepala Desa Terpilih dan paling lambat tiga bulan setelah penetapan/pengukuhan kepala desa. Di dalam lampiran RPJMDes ini tertuang acuan kerja dan rencana kerja selama enam tahun dan kegiatan perencanaan ini berdasarkan Musyawarah Dusun yang di laksanakan pada bulan Desember tahun 2018.

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa
NAMA-NAMA KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA TAHELE

No	Periode	Nama Kepala Desa Tahele	Keterangan
1	Tidak diketahui	Sebelum Tahun 1950
2	1950 – 1960	YAHYA RASYID	- KADES DEFINITIF
3	1961 – 1983	ROBINSON RUMAMPUK	- KADES DEFINITIF
4	1983 – 2000	SAID PAKEU	- KADES DEFINITIF
5	2001 – 2004	ASWIN HEMUTO	- KADES DEFINITIF
6	2005 – 2011	MOHAMAD SIDE	- KADES DEFINITIF
7	2011 – 2016	USMAN SINO	- KADES DEFINITIF
8	2016 – 2018	ISMAIL PANTUNA S,SOS	- KADES PENJABAT
9	2018 – 2024	RAMLY PAKEU, S.SOS	- KADES DEFINITIF

3. TARGET DAN SASARAN

4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini adalah variabel kompetensi (X1), regulasi (X2) dan Sarana prasarana (X3), sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$150 - 30$$

Rentang Skala = ----- = 24

$$5$$

Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Baik
105 – 129	Baik
80 – 104	Kurang Baik
55 – 79	Tidak Baik
30 – 54	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi (X1)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 7 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Pada indikator pendidikan**

Bobot	X1.1			X1.2			X1.3			X1.4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	53	11	55	37	17	85	57	8	40	27
4	11	44	37	14	56	47	6	24	20	11	44	37
3	2	6	7	5	15	17	5	15	17	6	18	20
2	0	0	0	0	0	0	2	4	7	2	4	7
1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3	3	10
Jumlah	30	131	100	30	126	100	30	128	100	30	109	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang latar belakang pendidikan semua aparat sudah sesuai dengan kebutuhan kantor desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab sangat setuju dengan skor 80, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 1 adalah 131.

Untuk pernyataan tentang aparat desa memahami siklus keuangan desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat setuju

dengan skor 55, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 15 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sehingga total skor item 2 adalah 126.

Untuk pernyataan tentang aparat desa memahami dengan baik tupoksinya diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, serta sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju sehingga total skor item 3 adalah 128.

Untuk pernyataan tentang seluruh aparat telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 6 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor 18, serta sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4 dan sebanyak 3 responden atau 10% menjawab sangat tidak setuju dengan skor 3 sehingga total skor item 4 adalah 109.

**Tabel 4.4. Tanggapan Responden
Pada indikator pelatihan & pengalaman**

Bobot	X1.5			X1.6			X1.7		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	7	35	23	14	70	47	12	60	40
4	15	60	50	14	56	47	13	52	43
3	5	15	17	2	6	7	3	9	10
2	3	6	10	0	0	0	1	2	3

1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Jumlah	30	116	100	30	132	100	30	124	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pemerintah desa mewajibkan aparat dalam rangka keikutsertaan aparat dalam pelatihan diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab setuju dengan skor 60 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15 serta 3 responden atau 10% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 5 adalah 116.

Untuk pernyataan tentang pengalaman sangat membantu aparat dalam hal kemampuan dalam bekerja diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 6 adalah 132.

Untuk pernyataan tentang seluruh aparat bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9, serta sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab tidak setuju dan 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 7 adalah 124.

Tabel 4.5.
Rekapan tanggapan Responden
Variabel kompetensi

		Statistics								
		Kompetensi	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sum	866	131	126	128	109	116	132	124	

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel kompetensi (X1) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel kompetensi (X1) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 124.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Regulasi (X2)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 4 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Tanggapan Responden
Pada indikator regulasi

Bobot	X2.1			X2.2			X2.3			X2.4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	10	50	33	14	70	47	18	90	60	21	105	70

4	17	68	57	13	52	43	8	32	27	7	28	23
3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	2	6	7
2	1	2	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0
1	1	1	3	2	2	7	2	2	7	0	0	0
Jumlah	30	124	100	30	127	100	30	129	100	30	139	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pemerintah desa telah gencar melaksanakan sistem kerja yang tertib administrasi diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab sangat setuju dengan skor 50, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3 serta 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 1 adalah 124.

Untuk pernyataan tentang lingkungan pemerintah desa patuh terhadap aturan diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3 serta 2 responden atau 7% menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 2 adalah 127.

Untuk pernyataan tentang dalam hal pekerjaan, aparat senantiasa tepat waktu diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, serta

sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab tidak setuju dengan skor 2 dan 2 responden atau 7% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 3 adalah 129.

Untuk pernyataan tentang dalam hal menjalankan tugasnya, aparat taat pada pimpinan diperoleh tanggapan responden sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor 105, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 139.

Tabel 4.7. Rekapan tanggapan Responden

Variabel regulasi

Statistics

	Regulasi	X21	X22	X23	X24
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0
	Sum	519	124	127	129
					139

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel regulasi (X2) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel regulasi (X2) yaitu rata-rata sebesar 130.

4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Sarana Prasarana (X3)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 5 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden

Pada indikator sarana prasarana

Bobot	X3.1			X3.2			X3.3			X3.4			X3.5		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	1 8	90	60	1 5	75	50	1 7	85	57	1 1	55	37	1 8	90	60
4	9	36	30	1 1	44	37	1 2	48	40	1 4	56	47	7	28	23
3	2	6	7	3	9	10	1	3	3	3	9	10	2	6	7
2	1	2	3	1	2	3	0	0	0	2	4	7	3	6	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3 0	13 4	10 0	3 0	13 0	10 0	3 0	13 6	10 0	3 0	12 4	10 0	3 0	13 0	10 0

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 1 adalah 134.

Untuk pernyataan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 11 responden atau 37% yang menjawab kurang setuju dengan skor 44 serta

3 responden atau 10% menjawab sangat tidak setuju dengan skor 9 dan 1 responden atau 3% yang menjawab tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 2 adalah 130.

Untuk pernyataan tentang pemerintah desa kut serta dalam kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur di desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor 85, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga total skor item 3 adalah 136.

Untuk pernyataan tentang masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan nfrastruktur di desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 4 adalah 127.

Untuk pernyataan tentang pembangunan infrastruktur di desa sudah sesuai dengan perencanaan diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 3 responden atau 10% yang menjawab tidak setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 4 adalah 130.

Tabel 4.9. Tanggapan Responden

Variabel sarana prasarana

Statistics

		Sarana Dan Prasarana	X31	X32	X33	X34	X35
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Sum	654	134	130	136	124	130

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan analisis deskriptif data pada variabel sarana prasarana (X3) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel sarana prasarana (X3) yaitu rata-rata sebesar 131.

4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang berjumlah 12 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Tanggapan Responden

Pada indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bobot	Y1			Y2			Y3			Y4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%

5	4	20	13	9	45	30	12	60	40	7	35	23
4	4	16	13	16	64	53	14	56	47	17	68	57
3	10	30	33	2	6	7	4	12	13	5	15	17
2	4	8	13	2	4	7	0	0	0	0	0	0
1	8	8	27	1	1	3	0	0	0	1	1	3
Jumlah	30	82	100	30	120	100	30	128	100	30	119	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab sangat setuju dengan skor 20, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab setuju dengan skor 16 dan 10 responden atau 30% yang menjawab kurang setuju dengan skor 33 serta 4 responden atau 13% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 8, dan 8 responden atau 27% menjawab sangat tidak setuju dengan skor 8, sehingga total skor item 1 adalah 82.

Untuk pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab setuju dengan skor 64 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 2 responden atau 7% menjawab tidak setuju dengan skor 4 dan 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 2 adalah 120.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 3 adalah 128.

Untuk pernyataan tentang penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab sangat setuju dengan skor 35, sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab setuju dengan skor 68 dan 5 responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15 dan 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, sehingga total skor item 4 adalah 119.

**Tabel 4.11. Tanggapan Responden
Pada indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Bobot	Y5			Y6			Y7			Y8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	15	75	50	13	65	43	11	55	37	12	60	40
4	11	44	37	11	44	37	13	52	43	13	52	43
3	1	3	3	3	9	10	4	12	13	4	12	13
2	1	2	3	3	6	10	2	4	7	1	2	3
1	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	126	100	30	124	100	30	123	100	30	126	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3 serta 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, dan 2 responden atau 7% menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 5 adalah 126.

Untuk pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 serta 3 responden atau 10% menjawab tidak setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 6 adalah 124.

Untuk pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 7 adalah 123.

Untuk pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60,

sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12 dan 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 8 adalah 126.

**Tabel 4.12. Tanggapan Responden
Pada indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Bobot	Y9			Y10			Y11			Y12		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	13	65	43	13	65	43	8	40	27	9	45	30
4	12	48	40	13	52	43	15	60	50	16	64	53
3	2	6	7	2	6	7	3	9	10	3	9	10
2	3	6	10	2	4	7	2	4	7	2	4	7
1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	0	0	0
Jumlah	30	125	100	30	127	100	30	115	100	30	122	100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2021

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab setuju dengan skor 48 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 3 responden atau 10% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 9 adalah 125.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju dengan skor 52 dan 2 responden atau 7% yang menjawab kurang setuju dengan skor 6 serta 2 responden atau 7% menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 10 adalah 127.

Untuk pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab sangat setuju dengan skor 60, sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56 dan 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga total skor item 3 adalah 128.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab sangat setuju dengan skor 40, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab setuju dengan skor 60 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9 dan 2 responden atau 7% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 4 dan 2 responden atau 7% yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 11 adalah 115.

Untuk pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab setuju dengan skor 64 dan 3 responden atau 10% yang menjawab kurang

setuju dengan skor 9 dan 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga total skor item 11 adalah 122.

**Tabel 4.13. Rekapan Tanggapan Responden
Pada indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa**

		Pengelolaan Keuangan Desa	Statistics											
			Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	1437	82	120	128	119	126	124	123	126	125	127	115	122

Sumber : Olahan Data Deskriptif SPSS-16 tahun 2021

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) yaitu rata-rata sebesar 120.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil persamaan regresi :

Tabel 4.14. Coefficients^a**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.563	6.932		.802	.430		
Kompetensi	.131	.255	.087	.513	.613	.546	1.830
Regulasi	.780	.336	.339	2.322	.028	.731	1.367
Sarana Dan Prasarana	1.151	.322	.537	3.573	.001	.689	1.451

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda $Y = 5,563 + 0,131X_1 + 0,780X_2 + 1.151X_3 + \epsilon$ dimana nilai constant 5,563 yang berarti jika variabel kompetensi, regulasi dan sarana prasarana di asumsikan sama dengan 0, maka pengelolaan ADD di desa Tahele adalah sebesar 5,563.

Koefisien variabel kompetensi (b_1) sebesar 0,131 yang bermakna bahwa perubahan variabel kompetensi (b_1) akan di ikuti oleh perubahan pengelolaan ADD sebesar 0,131 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. variabel regulasi (b_2) akan di ikuti oleh perubahan pengelolaan ADD sebesar 0,780 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. variabel sarana prasarana (b_3) akan di ikuti oleh perubahan pengelolaan ADD sebesar 1,151 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel kompetensi (b_1) dan variabel regulasi (b_2) serta variabel sarana prasarana (b_3) terhadap variabel pengelolaan ADD pada desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato secara simultan, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi (R^2) berikut ini.

Tabel 4.15. Model Summary

Model Summary^b

Mo del	R	R Squar e	Adjus te R Square	Std. Error of the Estimat e	Change Statistics					Durbin- Watson
					R Square Change	F Chan ge	df1	df2	Sig. F Change	
1	.771 ^a	.595	.548	4.164	.595	12.72 0	3	26	.000	1.300

a. Predictors: (Constant), Sarana Dan Prasarana, Regulasi, Kompetensi

b. Dependent Variable:
Pengelolaan Keuangan Desa

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r^2) sebesar 0,595 atau 59,5%. Yang berarti bahwa besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD yang terdiri dari kompetensi, regulasi dan sarana prasarana sebesar 0,595. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD yang terdiri dari kompetensi, regulasi dan sarana prasarana mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan ADD pada desa Tahele

Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato sebesar 59,5%, sedangkan sisanya sebesar 40,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Secara parsial, variabel kompetensi, regulasi dan sarana prasarana pada pengelolaan ADD pada desa Tahele Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t sebagaimana pada tabel dibawah ini, jika dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 adalah :

Tabel 4.16. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.563	6.932		.802	.430		
Kompetensi	.131	.255	.087	.513	.613	.546	1.830
Regulasi	.780	.336	.339	2.322	.028	.731	1.367
Sarana Dan Prasarana	1.151	.322	.537	3.573	.001	.689	1.451

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,513. Yang berarti bahwa variabel kompetensi (b1) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan ADD pada desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,613 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,613 > 0,05$).

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,322. Yang berarti bahwa variabel regulasi (b2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan ADD pada desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,028 < 0,05$).

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,573. Yang berarti bahwa variabel sarana dan prasarana (b3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan ADD pada desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,001 < 0,05$).

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel kompetensi (b1), regulasi (b2) dan sarana prasarana (b3) terhadap pengelolaan ADD dengan menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel, dimana $df 1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$ diperoleh dari jumlah variabel independen dan

variabel dependen, sedangkan $df_2 = n - k = 30 - 5 = 25$. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.17. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	661.782	3	220.594	12.720	.000 ^a
	Residual	450.918	26	17.343	
	Total	1112.700	29		

a. Predictors: (Constant), Sarana Dan Prasarana, Regulasi, Kompetensi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F hitung sebesar $12,720 > \text{sig.}$ sebesar 0,000 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya hubungan antara kompetensi (b1), regulasi (b2) dan sarana prasarana (b3) terhadap pengelolaan ADD di desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato sebesar 0,595 adalah signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Faktor kompetensi aparat secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,131 namun tidak signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Faktor regulasi tingkat desa secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,780 dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
3. Faktor sarana dan prasarana secara parsial berpengaruh positif sebesar 115,1% dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
4. Faktor kompetensi aparat, regulasi tingkat desa, sarana dan prasarana secara simultan berpengaruh positif sebesar 0,595 dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi :

1. Pemerintah Desa harus mempertimbangkan kembali kompetensi aparatnya dalam mengelola setiap Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Desa harus menjaga regulasi aparatnya dalam pengelolaan setiap Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
3. Pemerintah Desa dan masyarakat bekerja sama dalam hal pengelolaan setiap Alokasi Dana Desa yang bertujuan membangun sarana dan prasarana yang ada di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Hariandja, MarihotTua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kodoatie, R. J. dan Sjarief, 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- _____. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Puspawijaya, Adrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D".Alfabeta, Bandung.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (editor). 2013. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia ; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 62 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. merupakan peraturan penganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2021										
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
Observasi											
Usulan Judul											
Penyusunan Proposal dan Bimbingan											
Ujian Proposal											
Revisi Proposal											
Pengolahan Data & Bimbingan											
Ujian Skripsi											
Revisi Skripsi											

Lampiran 2

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato**” Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

Rawi Adam

NIM E2119238

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					
No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS

1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

B. KOMPETENSI (X1)

No	Pernyataan Indikator Pendidikan	SS	S	KS	TS	STS
1	Latar Belakang Pendidikan semua aparat sudah sesuai dengan kebutuhan kantor desa					
2	Aparat desa memahami siklus keuangan desa					
3	Aparat desa memahami dengan baik tupoksinya					

No	Pernyataan Indikator Pelatihan	SS	S	KS	TS	STS
1	Seluruh aparat telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan					
2	Pemerintah desa mewajibkan aparat dalam rangka keikutsertaan aparat dalam pelatihan					

No	Pernyataan Indikator Pengalaman	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengalaman sangat membantu aparat dalam hal kemampuan dalam bekerja					
2	Seluruh aparat bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing					

C. REGULASI (X2)

No	Pernyataan Indikator Tertib	SS	S	KS	TS	STS
1	Pemerintah desa telah gencar melaksanakan sistem kerja yang tertib administrasi					
2	Lingkungan pemerintah desa patuh terhadap aturan					

No	Pernyataan Indikator Sesuai Ketentuan	SS	S	KS	TS	STS
1	Dalam hal pekerjaan, aparat senantiasa tepat waktu					
2	Dalam hal menjalankan tugasnya, aparat taat pada pimpinan					

D. SARANA DAN PRASARANA (X3)

No	Pernyataan Indikator Fisik	SS	S	KS	TS	STS
1	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa					
2	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur					

No	Pernyataan Indikator Non Fisik	SS	S	KS	TS	STS
1	Pemerintah desa ikut serta dalam kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur di desa					
2	Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa					
3	Pembangunan infrastruktur di desa sudah sesuai dengan perencanaan					

Lampiran 3

TABULASI DATA

Z	KOMPETENSI (X1)							Jml
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	4	5	5	5	5	5	34
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	4	4	4	5	4	4	30
4	5	5	5	4	5	5	5	34
5	4	4	5	4	4	4	4	29
6	5	4	3	5	4	5	5	31
7	3	3	4	5	4	5	5	29
8	4	4	3	5	3	5	2	26
9	5	4	5	1	3	5	4	27
10	1	3	3	1	3	4	3	18
11	5	3	4	1	4	4	3	24
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	3	3	3	4	3	3	22
14	4	3	2	4	4	4	4	25
15	4	4	2	3	4	3	1	21
16	4	4	5	4	5	5	5	32
17	4	5	5	5	5	5	5	34
18	4	4	5	3	3	5	4	28
19	5	4	5	3	3	5	5	30
20	5	5	5	2	2	4	4	27
21	5	5	5	5	2	4	4	30
22	5	5	5	2	2	4	5	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	4	3	3	4	4	4	27
25	4	5	5	5	5	5	5	34
26	5	5	5	4	4	4	4	31
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	5	5	5	3	4	4	4	30
29	5	5	5	4	4	5	5	33
30	5	5	5	4	4	5	5	33

n	REGULASI (X2)				Jml	n	SARANA & PRASARANA REGULASI (X3)					Jml
	1	2	3	4			1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	16	1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	20	2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	20	3	4	4	4	4	5	21
4	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	16	5	4	4	4	5	5	22
6	4	4	1	3	12	6	5	5	5	3	5	23
7	5	1	3	5	14	7	5	5	4	3	3	20
8	5	5	4	5	19	8	5	4	4	5	5	23
9	5	4	5	3	17	9	5	5	5	4	4	24
10	2	5	2	4	13	10	4	3	5	5	2	19
11	3	1	1	5	10	11	3	4	5	5	5	22
12	4	4	5	4	17	12	4	4	4	4	2	18
13	4	5	5	5	19	13	5	5	5	3	3	21
14	4	4	5	5	18	14	3	2	3	2	2	12
15	1	3	4	4	12	15	2	4	4	2	4	16
16	5	5	5	5	20	16	4	5	5	4	5	23
17	5	5	5	4	19	17	5	5	5	4	5	24
18	4	5	5	5	19	18	5	3	5	4	4	21
19	4	5	5	5	19	19	4	4	5	4	5	22
20	4	4	5	5	18	20	5	5	5	4	5	24
21	4	5	5	5	19	21	5	3	5	4	5	22
22	4	4	5	5	18	22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	5	17	23	5	5	4	4	4	22
24	4	4	4	5	17	24	4	4	4	4	5	21
25	5	5	5	5	20	25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	16	26	5	4	4	4	4	21
27	4	4	5	5	18	27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	5	17	28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	20	29	5	5	4	4	4	22
30	5	5	5	5	20	30	5	5	5	5	5	25

Z	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	49
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	47
4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	50
6	3	4	3	3	5	5	5	3	4	2	2	3	42
7	3	3	5	4	1	3	4	5	5	4	5	5	47
8	3	2	3	5	4	3	3	5	4	5	5	3	45
9	4	5	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	47
10	1	5	4	5	5	2	2	2	2	5	1	2	36
11	3	4	5	1	1	5	2	5	2	5	4	5	42
12	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	45
13	5	5	5	3	2	3	3	4	3	3	3	4	43
14	2	4	3	3	4	2	3	4	4	2	2	2	35
15	3	2	3	4	3	2	3	4	2	4	1	3	34
16	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	53
17	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	56
18	2	5	5	4	5	4	4	5	5	5	3	5	52
19	1	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	52
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
21	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	54
22	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
23	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
24	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	52

25	1	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	51
26	1	1	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	44
27	1	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	45
28	1	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	51
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
30	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	55

Lampiran 4

FREQUENCY VARIABEL Y

Statistics

	Pengel. Keu. Desa	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	1437	82	120	128	119	126	124	123	126	125	127	115	122

Frequency Table
Pengelolaan Keuangan Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34	1	3.3	3.3	3.3
	35	1	3.3	3.3	6.7
	36	1	3.3	3.3	10.0
	42	2	6.7	6.7	16.7
	43	1	3.3	3.3	20.0
	44	1	3.3	3.3	23.3
	45	3	10.0	10.0	33.3
	46	1	3.3	3.3	36.7
	47	4	13.3	13.3	50.0
	49	2	6.7	6.7	56.7
	50	1	3.3	3.3	60.0
	51	2	6.7	6.7	66.7
	52	3	10.0	10.0	76.7
	53	2	6.7	6.7	83.3
	54	1	3.3	3.3	86.7
	55	1	3.3	3.3	90.0
	56	2	6.7	6.7	96.7

59	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	26.7	26.7	26.7
	2	4	13.3	13.3	40.0
	3	10	33.3	33.3	73.3
	4	4	13.3	13.3	86.7
	5	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	2	6.7	6.7	10.0
	3	2	6.7	6.7	16.7
	4	16	53.3	53.3	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	13.3	13.3	13.3
	4	14	46.7	46.7	60.0
	5	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	5	16.7	16.7	20.0
	4	17	56.7	56.7	76.7
	5	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	2	1	3.3	3.3	10.0
	3	1	3.3	3.3	13.3
	4	11	36.7	36.7	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	10.0	10.0	10.0
	3	3	10.0	10.0	20.0
	4	11	36.7	36.7	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	4	13.3	13.3	20.0
	4	13	43.3	43.3	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	4	13.3	13.3	16.7
	4	13	43.3	43.3	60.0
	5	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	10.0	10.0	10.0
	3	2	6.7	6.7	16.7
	4	12	40.0	40.0	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	2	6.7	6.7	13.3
	4	13	43.3	43.3	56.7
	5	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	2	2	6.7	6.7	13.3
	3	3	10.0	10.0	23.3
	4	15	50.0	50.0	73.3
	5	8	26.7	26.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	3	10.0	10.0	16.7
	4	16	53.3	53.3	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 5

FREQUENCY VARIABEL X₁

		Statistics								
	Kompetensi	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17		
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum	866	131	126	128	109	116	132	124	

Kompetensi					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	18	1	3.3	3.3	3.3
	21	1	3.3	3.3	6.7
	22	1	3.3	3.3	10.0
	24	1	3.3	3.3	13.3
	25	1	3.3	3.3	16.7
	26	1	3.3	3.3	20.0
	27	3	10.0	10.0	30.0
	28	5	16.7	16.7	46.7
	29	2	6.7	6.7	53.3
	30	4	13.3	13.3	66.7
	31	2	6.7	6.7	73.3
	32	1	3.3	3.3	76.7
	33	2	6.7	6.7	83.3
	34	4	13.3	13.3	96.7
	35	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X11					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	3	2	6.7	6.7	10.0
	4	11	36.7	36.7	46.7
	5	16	53.3	53.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	16.7	16.7	16.7
	4	14	46.7	46.7	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	5	16.7	16.7	23.3
	4	6	20.0	20.0	43.3
	5	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	10.0	10.0	10.0
	2	2	6.7	6.7	16.7
	3	6	20.0	20.0	36.7
	4	11	36.7	36.7	73.3
	5	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	10.0	10.0	10.0
	3	5	16.7	16.7	26.7
	4	15	50.0	50.0	76.7
	5	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	14	46.7	46.7	53.3

5	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	3.3	3.3	3.3
2	1	3.3	3.3	6.7
3	3	10.0	10.0	16.7
4	13	43.3	43.3	60.0
5	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 6

FREQUENCY VARIABEL X₂

Statistics

	Regulasi	X21	X22	X23	X24
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0
Sum		519	124	127	129
					139

Regulasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10	1	3.3	3.3	3.3
12	2	6.7	6.7	10.0
13	1	3.3	3.3	13.3
14	1	3.3	3.3	16.7
16	3	10.0	10.0	26.7
17	5	16.7	16.7	43.3
18	4	13.3	13.3	56.7
19	7	23.3	23.3	80.0
20	6	20.0	20.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	1	3.3	3.3	6.7
	3	1	3.3	3.3	10.0
	4	17	56.7	56.7	66.7
	5	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	3	1	3.3	3.3	10.0
	4	13	43.3	43.3	53.3
	5	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	2	1	3.3	3.3	10.0
	3	1	3.3	3.3	13.3
	4	8	26.7	26.7	40.0
	5	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	7	23.3	23.3	30.0
	5	21	70.0	70.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 7

FREQUENCY VARIABEL X₃

Statistics						
	Sarana Dan Prasarana	X31	X32	X33	X34	X35
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0
Sum		654	134	130	136	124
						130

Sarana Dan Prasarana

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	1	3.3	3.3
	16	1	3.3	3.3
	18	1	3.3	3.3
	19	1	3.3	3.3
	20	2	6.7	6.7
	21	6	20.0	20.0
	22	6	20.0	20.0
	23	3	10.0	10.0
	24	3	10.0	10.0
	25	6	20.0	20.0
Total		30	100.0	100.0

X31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3
	3	2	6.7	6.7
	4	9	30.0	30.0
	5	18	60.0	60.0
Total		30	100.0	100.0

X32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3
	3	3	10.0	10.0
	4	11	36.7	36.7
	5	15	50.0	50.0
				100.0

X32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	3	10.0	10.0	13.3
	4	11	36.7	36.7	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3.3	3.3	3.3
	4	12	40.0	40.0	43.3
	5	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X34

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	3	10.0	10.0	16.7
	4	14	46.7	46.7	63.3
	5	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X35

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	10.0	10.0	10.0
	3	2	6.7	6.7	16.7
	4	7	23.3	23.3	40.0
	5	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 8

OUTPUT REGRESSION

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengelolaan Keuangan Desa	47.90	6.194	30
Kompetensi	28.87	4.108	30
Regulasi	17.30	2.693	30
Sarana Dan Prasarana	21.80	2.894	30

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sarana Dan Prasarana, Regulasi, Kompetensi ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.771 ^a	.595	.548	4.164	.595	12.720	3	26	.000	1.300

a. Predictors: (Constant), Sarana Dan Prasarana, Regulasi, Kompetensi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	661.782	3	220.594	12.720	.000 ^a
Residual	450.918	26	17.343		
Total	1112.700	29			

a. Predictors: (Constant), Sarana Dan Prasarana, Regulasi, Kompetensi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

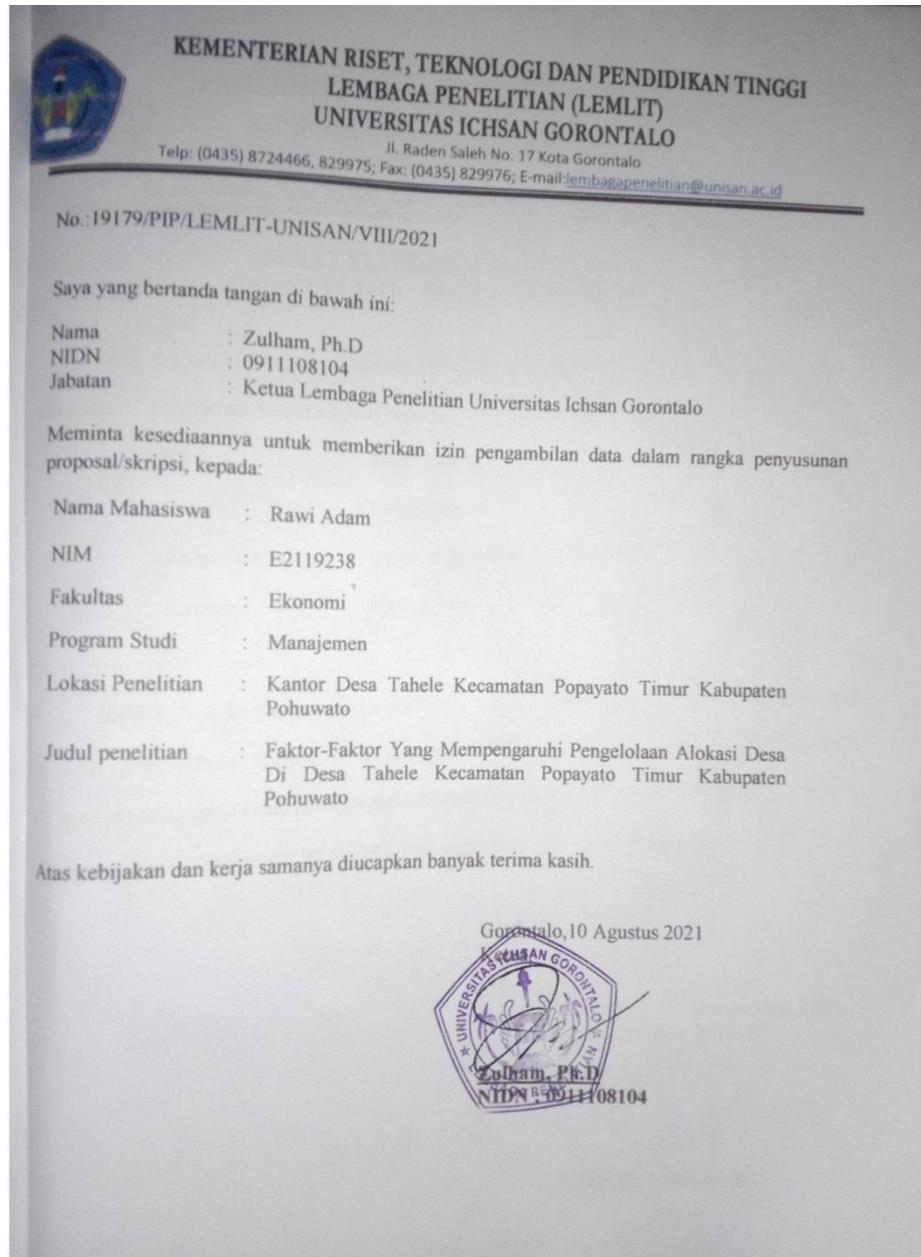
Lampiran 5 Frequency Variabel X₁

Coefficients^a

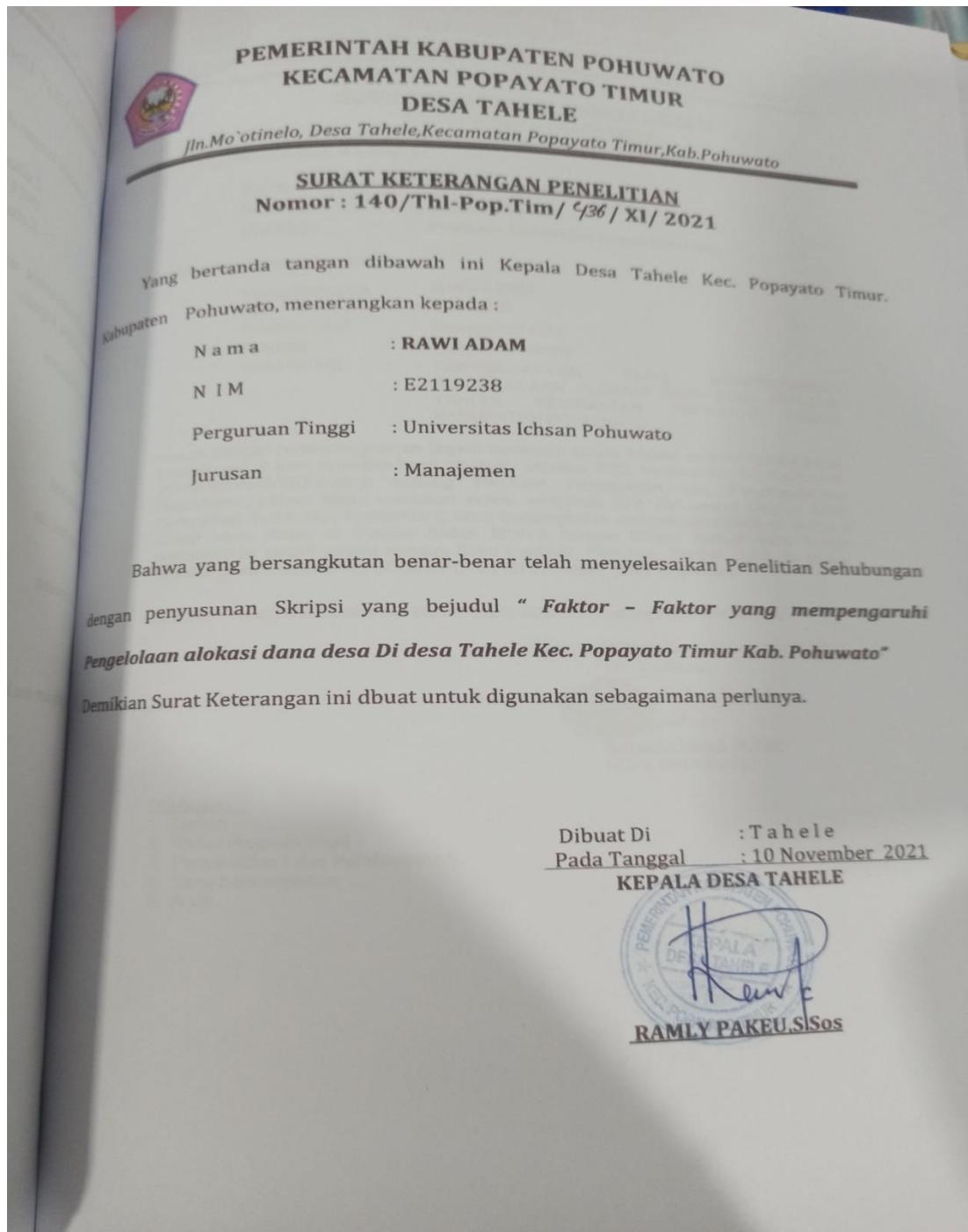
Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.563	6.932		.802	.430		
Kompetensi	.131	.255	.087	.513	.613	.546	1.830
Regulasi	.780	.336	.339	2.322	.028	.731	1.367
Sarana Dan Prasarana	1.151	.322	.537	3.573	.001	.689	1.451

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 9



Lampiran 10



Lampiran 11

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 0947/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taiiki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	RAWI ADAM
NIM	:	E2119238
Program Studi	:	Manajemen (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi	:	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TAHELE KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHUWATO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 November 2021
Tim Verifikasi,


Sunarto Taiiki, M.Kom
NIDN. 0906058301

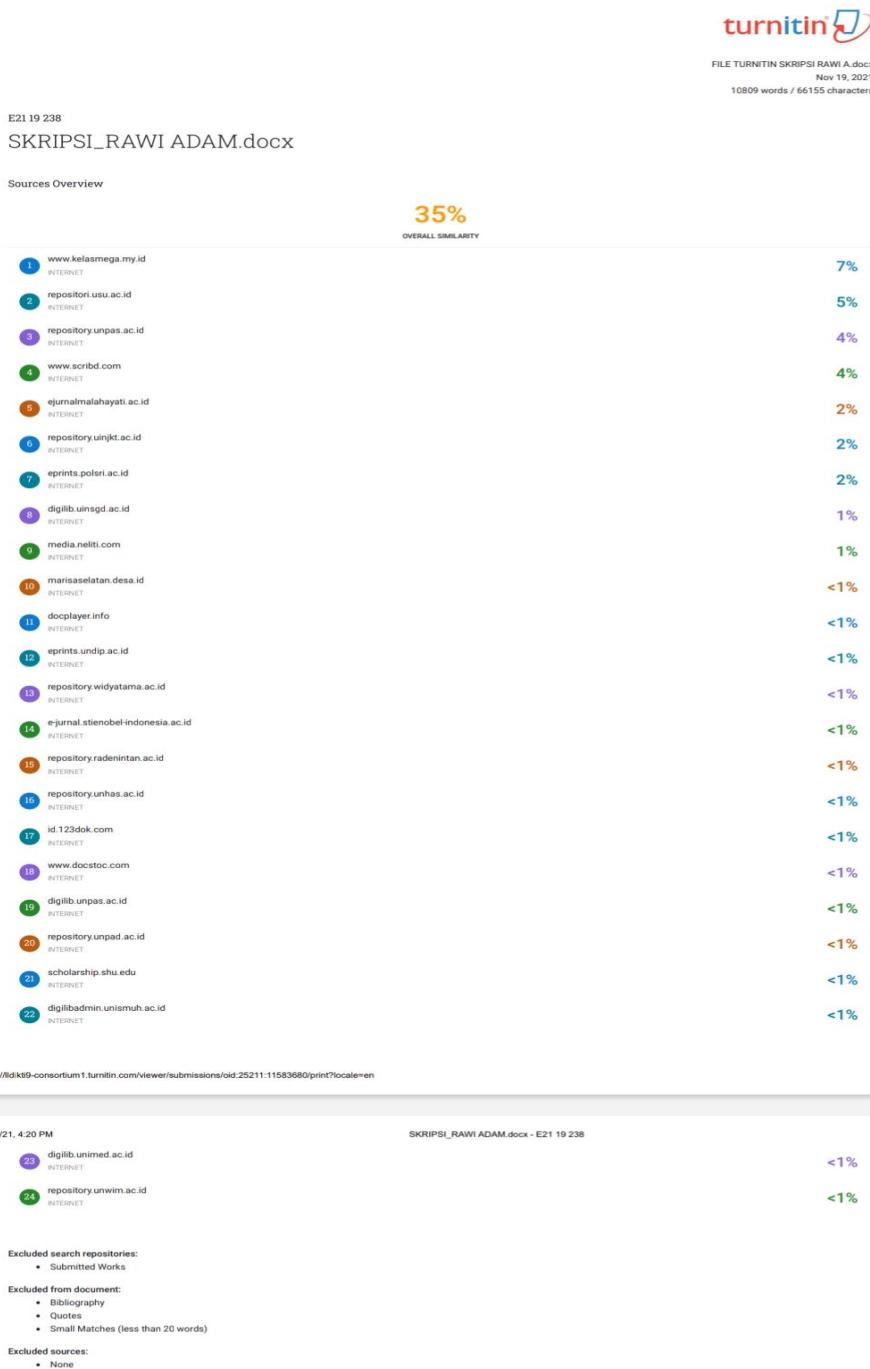
Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 12

9/21, 4:20 PM

SKRIPSI_RAWI ADAM.docx - E21 19 238



Lampiran 13

CURRICULUM VITAE

1. Identritas Pribadi



Nama	:	Rawi Adam
NIM	:	E21.19.238
Tempat/Tgl Lahir	:	Tahele, 10 Juni 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Keuangan
Alamat	:	Desa Tahele, Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 01 Popayato Timur pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP NEGERI 1 POPAYATO TIMUR pada tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 TAPA pada tahun 2017Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.